



**LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025**



## TIM PENYUSUN

### BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak, S.H., M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo, S
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S, Sos., M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

## DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA .....	1
TIM PENYUSUN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan .....	5
1.3.1 Definisi .....	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan .....	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan .....	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja .....	7
BAB II PEMBAHASAN.....	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan .....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan .....	16
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan .....	18
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan .....	21
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan .....	23
BAB III PENUTUP.....	26



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

### **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;



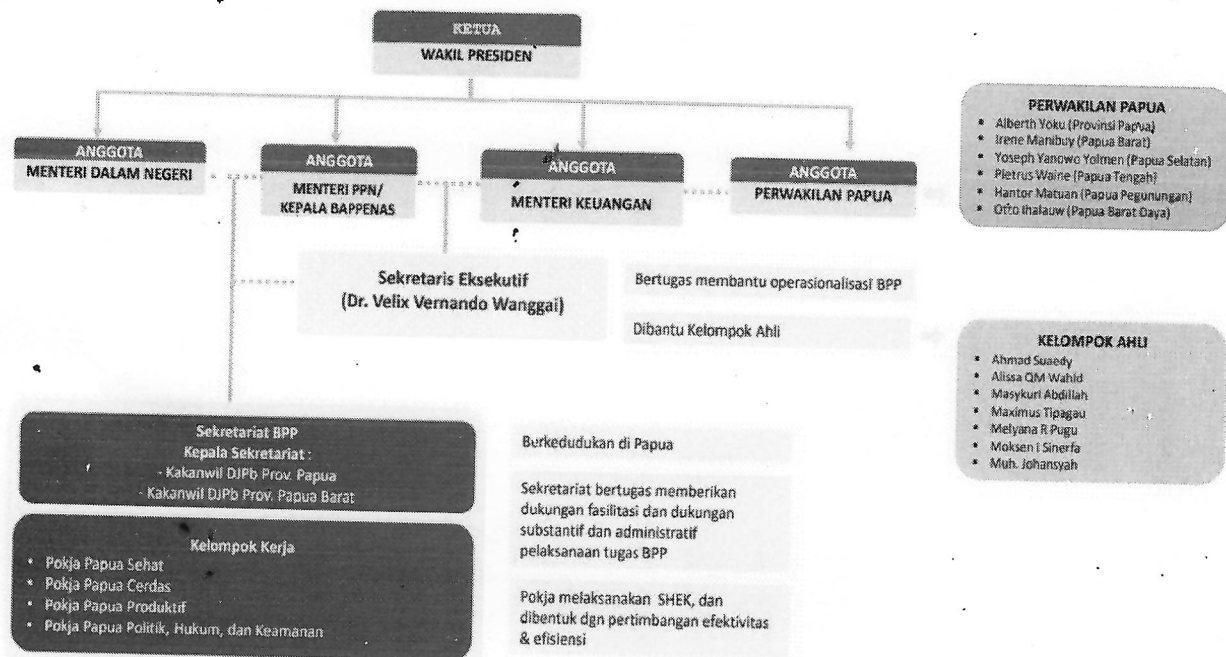
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

### **1.3 Ringkasan Kelembagaan**

#### **1.3.1 Definisi**

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### 1.3.2 Struktur Kelembagaan



### 1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
  - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
  - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;



- d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

#### **1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja**

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

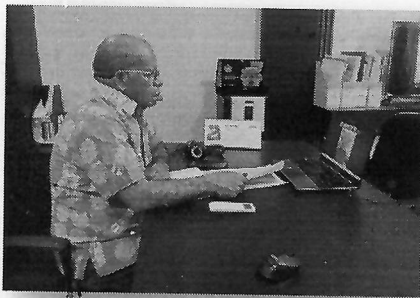


## BAB II PEMBAHASAN

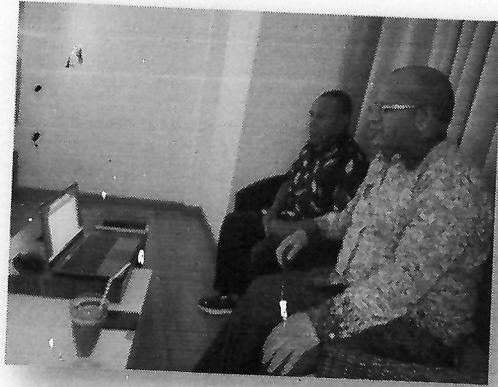
Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya per Bulan Februari tahun 2025 antara lain:

### 2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

• **Koordinator: Hantor Matuan, S.IP.**

<b>Kegiatan 1</b>		
Nama Kegiatan	:	Meeting zoom internal bersama 6 Anggota BP3OKP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	15 Februari 2025, bertempat di Ruang kerja Anggota BPP Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat zoom membahas anggaran BP3OKP
Peserta Kegiatan	:	6 Anggota BP3OKP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Seluruh anggota badan pengarah membahas keperluan dan kebutuhan di masing-masing BPP dan membahas anggaran yang di berikan bagi masing-masing pokja BPP
Dokumentasi Kegiatan	:	

<b>Kegiatan 2</b>		
Nama Kegiatan	:	Zoom Meeting Seluruh Anggota Panitia seleksi DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan Jalur Otonomi Khusus Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	18 Februari 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo Wamena.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mem bahas seleksi DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan Jalur Otonomi Khusus Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	Anggota BPP Provisi Papua Pegunungan dan Pansel DPRP Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Rapat ini membahas teknis tata cara tes tertulis, tes wawancara dan tes makalah, dan akan di laksanakan pada 20 Februari 2025.
Dokumentasi Kegiatan	:	

<b>Kegiatan 3</b>		
Nama Kegiatan	:	Hadir dan mendengarkan aspirasi siswa/siswi menolak Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	18 Februari 2025, bertempat di Halaman Kantor Bupati Jayawijaya dan Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Hadir untuk mendengar dan menerima aspirasi siswa/siswi yang menolak makan gizi gratis di Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Pj Bupati Provinsi Papua Pegunungan, Anggota BP3OKP, dan demonstran yang hadir dalam demo damai Menolak makan gizi gratis di Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan evaluasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemda dan BP3OKP menerima aspirasi yang di lakukan oleh seluruh pelajar di Wamena yang menolak makan gizi gratis karena lebih membutuhkan Pendidikan Gratis daripada




		makan gratis, menindaki hal tersebut Pemerintah provinsi berkomitmen untuk membahas dan menindaklanjuti aspirasi ke pemerintah pusat.
Dokumentasi Kegiatan	:	


<b>Kegiatan 4</b>		
Nama Kegiatan	:	Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua Pegunungan Periode 2025-2030 oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	26 Februari 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menghadiri dan menyaksikan Penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Anggota BP3OKP, Ketua MRP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan OPD di Lingkungan Pemerintah Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	KPU Provinsi Papua Pegunungan resmi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih John Tabo dan Ones Pahabol sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua Pegunungan Periode 2025-2030, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengumumkan akan melakukan sidang paripurna penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Periode 2025-2030 pada tanggal 27 Februari 2025.




Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan antar Bupati Terpilih Kabupaten Jayawijaya bersama Pemda Kabupaten Jayawijaya dan Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	10 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Baliem
Tujuan dan fungsi kegiatan yang akan dilaksanakan	:	Membahasan kesiapan dan persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya.
Peserta Kegiatan	:	Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya, Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Pemda Kabupaten Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	<p>Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 20 Februari 2025 sesuai dengan agenda Nasional Pelantikan serentak</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya siap mensukseskan acara pelantikan bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya Periode 2025 - 2030</p>

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--


<b>Kegiatan 6</b>		
Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan Tes Penyusunan Makalah Calon Anggota DPRD oleh Panitia Seleksi DPRD Provinsi Papua Pegunungan Mekanisme Pengangkatan Jalur Otonomi Khusus Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	21 Februari 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Panitia seleksi melakukan tes makalah bagi calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Panitia seleksi DPRD Papua Pegunungan, Peserta tes.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Tes penyusunan makalah berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan panel telah menerima hasil penyusunan makalah dan akan di lanjutkan dengan tes Wawancara.
Dokumentasi Kegiatan	:	



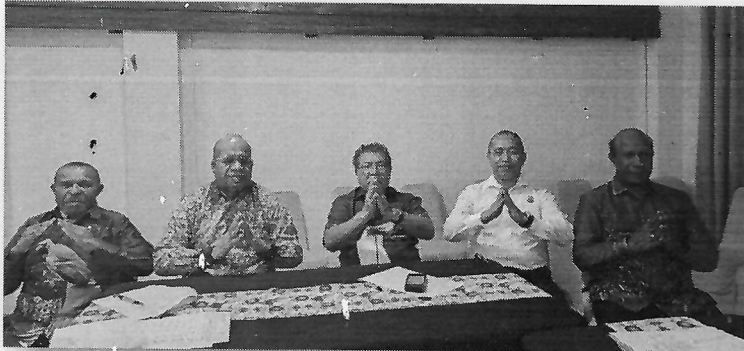
<b>Kegiatan 7</b>		
Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan Tes tertulis Calon Anggota DPRD oleh Panitia Seleksi DPRD Provinsi Papua Pegunungan Mekanisme Pengangkatan Jalur Otonomi Khusus Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	20 Februari 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Panitia seleksi melakukan tes tertulis bagi calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Panitia seleksi DPRD Papua Pegunungan, Peserta tes.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Tes tertulis berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan pnsel telah menerima hasil tes tertulis, dan akan di lanjutkan dengan tes penyusunan makalah
Dokumentasi Kegiatan	:	

<b>Kegiatan 8</b>		
Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan Wawancara Calon Anggota DPRD oleh Panitia Seleksi DPRD Provinsi Papua Pegunungan Mekanisme Pengangkatan Jalur Otonomi Khusus Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	24 s.d. 25 Februari 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Panitia seleksi melakukan tes wawancara bagi calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan.



Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Panitia seleksi DPRP Papua Pegunungan, Peserta tes.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan Hasil Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Tes Wawancara berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan pansel telah menerima hasil tes tertulis, tes wawancara dan tes penyusunan makalah, selanjutnya Panitia seleksi akan melanjutkan dengan memeriksa seluruh hasil tes peserta calon Anggota DPRP
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 9		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan seleksi berkas calon anggota DPRP Papua Pegunungan serta Penetapan Jadwal Pelaksanaan tes tertulis, makalah, dan wawancara calon DPRP-PP Mekanisme Pengangkatan OAP Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	14 Februari 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Panitia Seleksi mengumumkan pleno penetapan jadwal pelaksanaan tes tertulis pada tanggal 20 Februari 2025, tes penyusunan makalah pada tanggal 21 Februari 2024, dan tes wawancara pada tanggal 24 s.d. 25 Februari 2025 bagi calon Anggota DPRP Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Panitia seleksi DPRP Papua Pegunungan, Calon Anggota DPRP Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan	:	Koordinasi dan Evaluasi

yang di laksanakan		
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Penetapan dan pengumuman hasil seleksi Calon Anggota DPRP-PPP Jalur OTSUS dari Kabupaten Lanny Jaya Pansel mengumumkan hasil rapat Pleno Penetapan Jadwal Pelaksanaan tes tertulis, makalah, dan wawancara calon DPRP-PP Mekanisme Pengangkatan OAP Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 10		
Nama Kegiatan	:	Pleno penetapan calon anggota DPRP Papua Pegunungan yang lulus tes pemberkasan hingga tes wawancara oleh Panitia seleksi DPRP.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	27 Februari 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat pleno yang diadakan oleh Panitia Seleksi DPRP untuk memberikan keputusan calon Anggota DPRP yang lulus dalam tes pemberkasan hingga tes wawancara.
Peserta Kegiatan	:	Seluruh Panitia seleksi DPRP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Panitia seleksi DPRP telah memutuskan calon anggota yang lulus dalam tahap tes pemberkasan, tes tertulis, tes penyusunan makalah dan tes wawancara, dan selanjutnya hasil pleno akan di berikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan

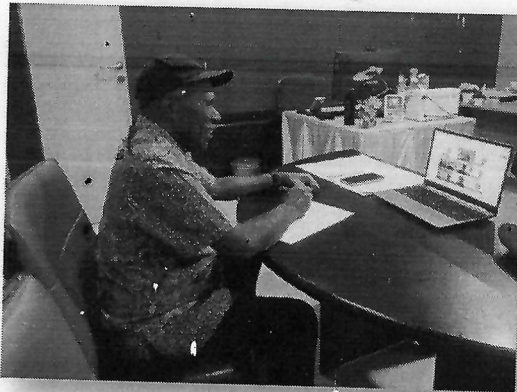




## 2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

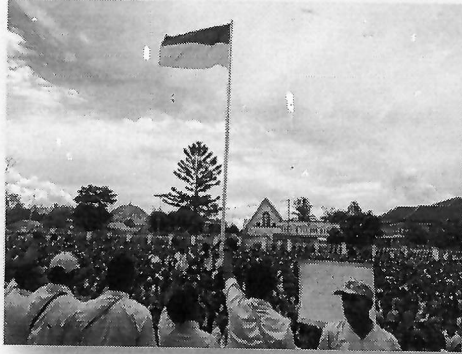
Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Zoom meeting Bimtek penguatan peran dan fungsi Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	26 Februari 2025, bertempat di Ruang kerja Pokja BPP Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Meeting zoom dalam rangka Kebijakan Tata Kelola Dana OTSUS Papua dan Peran Strategis BP3OKP sekaligus bimtek Penguatan Peran dan Fungsi Pokja BP3OKP.
Peserta Kegiatan	:	Seluruh Anggota dan Pokja BP3OKP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Polhukan Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Pemaparan materi tentang Kebijakan Tata Kelola Dana OTSUS, Papua dan Peran Strategis BP3OKP sekaligus bimtek Penguatan Peran dan Fungsi Pokja BP3OKP. Diskusi saran dan masukan dari masing-masing anggota BP3OKP perwakilan dari 6 Provinsi.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Mengawal berlangsungnya demo damai siswa/siswi menolak makan gratis di Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	18 Februari 2025, bertempat di Halaman Kantor Bupati Jayawijaya dan Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Ikut serta mengawal pengamanan demo damai siswa siswi yang menolak makan gizi gratis
Peserta Kegiatan	:	Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Pj Bupati Provinsi Papua Pegunungan, Anggota BP3OKP bersama dengan Pokja Papua Polhukam, aparat keamanan dan demonstiran yang hadir dalam demo damai Menolak makan gizi gratis di Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	Aksi demo menolak makan gizi gratis di Papua Pegunungan berlangsung dari pagi hari hingga siang hari berjalan dengan aman dan damai, aparat keamanan bersiaga di setiap lokasi demo.



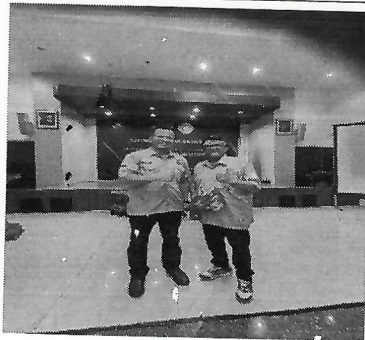
Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

### 2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan


Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Rakernas Taekwondo dan Koni Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	17 s.d. 18 Februari 2025, bertempat di Hotel Senayan Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas rencana kolaborasi KONI dan Cabang Olahraga Taekwondo dalam mempersiapkan kejuaraan Nasional maupun Internasional.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Produktif, Ketua Umum KONI, Sekjen KONI, Ketua Umum TaeKwonDo, Ketua Pengurus Seluruh Provinsi.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Kejelasan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Koni, Provinsi Papua Pegunungan harus segera berkolaborasi dengan Cabang TaeKwonDo untuk mempersiapkan kejuaraan Nasional maupun Internasional dan Pokja Papua Produktif BP3OKP harus melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi antara pengurus Koni dan TaeKwonDo Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan Kolaborasi dan Program di Provinsi Papua Pegunungan.


Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	---

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rakernas Pembentukan Program Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Oleh Yayasan Mutiaa Cendikia Nusantara
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	22 Februari 2025, bertempat di Ballroom Gedung Universitas Negeri Yogyakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat Pembentukan Program Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan
Peserta Kegiatan	:	Dr. Edy Prabowo, Titik Suharto, Rektor UNY, Ketua Umum Yayasan Pusat, Ketua umum Yayasan seluruh Provinsi, Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Pokja Papua Produktif mendukung, berkoordinasi dan mengevaluasi dengan OPD Provinsi/Kabupaten terkait Yayasan di maksud agar program dapat berjalan dengan baik dan terarah
Dokumentasi Kegiatan	:	



Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Tablig Akbar dan Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Keumatan Bagi Umat Muslim Jayawijaya dan Sekitarnya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	8 Februari 2025, bertempat di Masjid Agung Baiturrahman Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Sosialisasi peningkatan Ekonomi Keumatan bagi umat muslim Jayawijaya dan sekitarnya
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Produktif, Ketua umum Bimas Islam, Ketua Yapis, Ketua DMI, Ketua MUI, Ketua Baznaz, Ketua Paguyuban dan Tokoh lainnya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<p>Pokja Papua Produktif Sangat mendukung dengan ikut berkoordinasi, Harmonisasi dan Evaluasi dengan Kemenag (Bimas Islam), MUI, DMI dan Tokoh Umat Lainnya agar bisa mengawali kegiatan Perekonomian Umat ini dengan mengutamakan peningkatan Internal dengan belajar Program Ekonomi Umat Muslim wilayah PROV. PP terutama di JWJ dan sekitar.</p> <p>Saatnya wilayah Masjid- Masjid di PROV. PP harus muncul pelaku2 UMKM, Ekonomi kreatif dan usaha Lainnya dengan tetap selalu memperhatikan usaha kearifan lokal.</p>
Dokumentasi Kegiatan	:	


Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Diskusi Pimpinan DMI dan Lembaga-lembaga Lazir ( Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sodaqoh) Perwakilan wilayah Indonesia timur.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	20 Februari 2025, bertempat di Gedung DMI Pusat Jl. Matraman Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas manfaat Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sodaqoh dalam meningkatkan perekonomian umat dan membantu umat muslim yang kurang mampu.

Peserta Kegiatan	:	Sekjend DMI pusat, Wakil ketua DMI Pusat, Ketua Lazis DMI, Ketua sekretariat DMI, Ketua umum DMI dan Pengurus BAZNAS daerah
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<p>-BP3OKP - PAPUA PRODUKTIF Sangat memberi dukungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi dan Koordinasi Keberadaan BAZNAS dan LAZIS karena sangat membantu perekonomian Umat dan bisa sebagai lumbung ekonomi keuangan Umat untuk jangka waktu - waktu tertentu.</p> <p>-Kesadaran Umat Muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya berupa Zakat, Infaq Dan Sodaqoh diwilayah Provinsi Papua Pegunungan sangat membantu kekuatan Ekonomi Umat Muslim dalam jangka waktu tertentu. Umat Muslim sedang mengalami kekurangan finansial, makan dan Kesehatan Lembaga diatas mampu memberi bantuan dan penanganan yang sangat signifikan dengan syarat dan aturan yang telah ditetapkan.</p>
Dokumentasi Kegiatan	:	

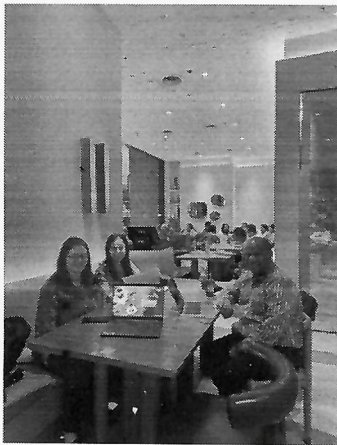
#### 2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Pokja Papua Cerdas bersama dengan Gubernur Papua Pegunungan terpilih dan Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	27 Februari 2025, bertempat di Kantor Dirjen Otda Kemendagri Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas Program-Program kerja Pokja Papua Cerdas yang sudah direncanakan dalam percepatan pembangunan Pendidikan di Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	Gubernur terpilih Papua Pegunungan, Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya, Pokja Papua Cerdas, Dirjen otda urusan papua.



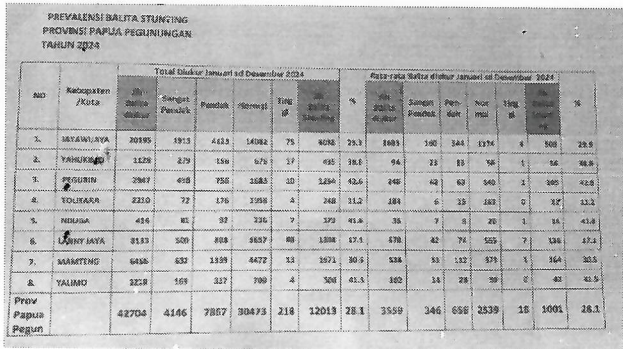
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua cerdas
Hasil Kegiatan	:	Gubernur dan bupati terpilih mendukung penuh program yang di sampaikan oleh Pokja papua Cerdas dan siap untuk bersama membangun Pendidikan di Papua Pegunungan yang lebih Cerdas
Dokumentasi Kegiatan	:	

<b>Kegiatan 2</b>		
Nama Kegiatan	:	Meeting bersama trainer dan staf Prof Yohanes Surya tentang program Gasing
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	18 Februari 2025, bertempat di Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas upaya untuk meningkatkan kualitas guru pengajar dalam Program Training guru
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Cerdas, trainer dan staf Prof Yohanes Surya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	:	Mengawali tahun 2025 dengan mempersiapkan Program training guru-guru SD di kabupaten Mamberamo tengah, Nduga dan Tolikara yang di harapkan program ini dapat memajukan Pendidikan di provinsi papua pegunungan

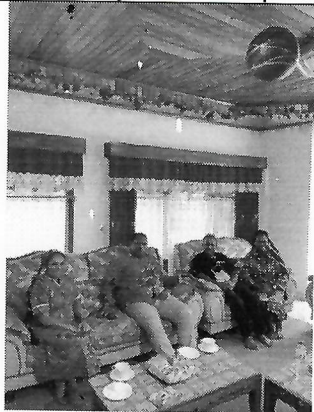
Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	---

## 2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	SHEK dan pendataan kasus stunting tahun 2024 di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan bersama Kabid gizi dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	7 Februari 2024, bertempat di
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengambil data kasus stunting tahun 2024 di 8 kabupaten
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Sehat, Kepala bidang gizi dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi dan memperoleh data prenvaleksi balita stunting tahun 2024
Dokumentasi Kegiatan	:	



<b>Kegiatan 2</b>		
Nama Kegiatan	:	Konsultasi dan membahas tupoksi BP3OKP bersama Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	10 Februari 2025, bertempat di kediaman Pokja Papua Sehat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas tupoksi Badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya, Pokja Papua Sehat
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Berdiskusi bersama bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya agar mengetahui garis besar tupoksi BP3OKP, dan akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah lebih lanjut setelah pelantikan bupati terpilih
Dokumentasi Kegiatan	:	

<b>Kegiatan 3</b>		
Nama Kegiatan	:	SHEK dan pendataan prevalensi stunting bayi, data IPM, AHH (UHH) dengan BAPPEDA kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	17 Februari 2025, bertempat di ruang kerja BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Meminta data prevalensi stunting bayi, data IPM, AHH (UHH)
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Sehat, BAPPEDA kabupaten Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi dan diskusi penanganan kasus stunting, peningkatan angka IPM tahun 2024 dan mengusahakan data yang belum lengkap terutama data dari puskesmas distrik.

<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	
-----------------------------	--



### **BAB III PENUTUP**

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang dilakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 7 Maret 2025  
BP3OKP  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



**HANTOR MATUAN, S.IP.**